

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2013). Perpajakan Pusat dan Daerah. Humaniora. Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah DJP Jabar III Masih Rendah. Diakses dari <https://www.cendananews.com/-kepatuhan-wajib-pajak-wilayah-djp-jabar-iii-masih-rendah>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Rasio Kepatuhan Pajak 2019. Diakses dari <https://www.djp.go.id/sites/default/files/2019/Rasio-Kepatuhan-Pajak->
- Gunadi. (2016). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Penerbit Bee Media Indonesia . Jakarta.
- Hadi, Sumasno. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Kata Efektif. Diakses dari <https://www.kbbi.web.id/efektif>
- Kementerian Keuangan. (2019). Alasan Wajib Pajak Wajib Laporan SPT. Diakses dari <https://money.kompas.com/alasan-wajib-pajak-wajib-lapor-spt>.
- Kementerian Keuangan. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2019). Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. Jurnal Volume XIV/Nomor 138. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2019). Mengenal Rasio Pajak Indonesia. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Sosialisasi Pelaporan SPT. Diakses dari <https://pu.go.id/berita/view/18023/sosialisasi-pelaporan-spt>.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-193/PJ/2015 Tentang Penunjukan PT *Achilles Advanced System* Sebagai Perusahaan Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik Yang Dapat Menyediakan Aplikasi dan/atau Menyalurkan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Ke Direktorat Jenderal Pajak.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2019). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Menyambut Indonesia Maju 2024. Diakses dari <https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-infrastuktur-menyambut-indonesia-maju-2024>.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Online Pajak*. (2018). Apa Yang Dimaksud Dengan *E-Filing*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>.
- Pekei, Beni. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Penerbit Taushia. Jakarta
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS Secara *E-Filing*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-29/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66 /PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta Petunjuk Pengisiannya.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pengantar Perpajakan. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Prakoso, Aryo., Galih Wicaksono., Sugeng Iswono., dan Yeni. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 4(1), 1–17.
- Republik Indonesia, Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sakti, Nufrensa Wira. (2015). Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara *Online*, Daftar, Bayar, Laporan. Penerbit Visimedia. Jakarta.
- Saputra, Hadi. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung.
- Tiraada, Tryana. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Widilestariningtyas, Ony. (2008). Pengantar Perpajakan. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

